

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN

Hermawan B. Prasetyo dan Arif Farid

STIE Cendekia Bojonegoro, Jl. Cendekia No.22 Bojonegoro

e-mail: herma_inside@yahoo.com

Abstract: Effect of Local Taxes and Levies Against Economic Growth, Poverty, and Unemployment. This research measured the regional tax and regional dues toward economic growth, poverty, and unemployment. This purpose is to explain how the impact of regional tax and regional dues to increase economic growth, and to decrease poverty, and unemployment. This is a quantitative research with the basic year model and one lag year model. Using the object from RAPBD on 2006 – 2010 in Bojonegoro district, this research also used ordinary least squares start from best linear unbiased prediction. The result showed that both the model of regional tax and regional dues no influence significantly toward economic growth, poverty, and unemployment. This caused of the regional tax and regional dues not to use for working to increase economic growth, and to decrease poverty, and unemployment.

Abstrak: Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran. Penelitian ini menguji pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan kemiskinan serta pengangguran dapat berkurang melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan persamaan tahun dasar dan lag satu tahun. Dengan menggunakan objek Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBD) tahun 2006 -2010 Kabupaten Bojonegoro, penelitian ini juga menggunakan metode analisis regresi berganda yang dimulai dengan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik dari persamaan tahun dasar maupun lag satu tahun, pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan kemungkinan pajak daerah dan retribusi daerah belum sepenuhnya difokuskan sebagai kegiatan peningkat pertumbuhan serta penurunan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bojonegoro.

Kata Kunci: pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah (Sidik, 2002; Kurniawan dan Purwanto, 2006). Lebih lanjut Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang per-

kembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Sehingga, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditandai dengan meningkatnya produktivitas serta pendapatan perkapita dari masyarakat daerah tersebut. Masih menurut Kuncoro (2004) bahwa tiga masalah pokok yang harus diperhatikan dalam mengukur pembangunan suatu negara atau daerah, yaitu: 1) apa yang terjadi pada tingkat kemiskinan, 2) apa yang terjadi terhadap pengangguran, dan 3) apa yang

terjadi terhadap ketimpangan dalam berbagai bidang.

Tenyata meningkatnya pajak daerah dan retribusi daerah tidak selalu berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut pernah diteliti Prasetyo (2010) pada propinsi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tetapi justru dapat meningkatkan pengangguran. Sedangkan retribusi daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun tidak berpengaruh pada kemiskinan dan pengangguran. Hal ini juga didukung oleh Setiyawati dan Hamzah, (2007); Hamzah, (2007) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, ternyata juga berdampak pada meningkatnya pengangguran (Setiyawati dan Hamzah, 2007; Nurhaeni dan Hamzah, 2007). Sedangkan Hamzah (2007) menemukan pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan dan pengangguran.

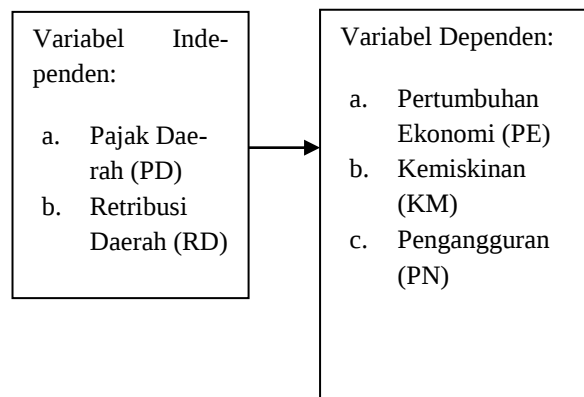
Penelitian ini ingin mengkaji kembali tentang teori fungsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran pada satu kabupaten yakni kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini berusaha untuk mengukur tingkat keberhasilan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bojonegoro. Sampel yang digunakan adalah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2006 – 2010. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data documenter. Adapun data dokumenter yang digunakan adalah 1) Laporan RAPBD Kabupaten Bojonegoro berupa pajak daerah dan retribusi daerah periode 2006-2010; dan 2) Data pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran periode 2006-2010. Sedangkan sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan situs online Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1 :



Variabel Independen:

1. Pajak Daerah (PD) adalah iuran wajib kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah diukur oleh total Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan Pajak Hiburan.
2. Retribusi Daerah (RD) adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan publik. Retribusi Daerah diukur dari total jenis Retribusi Jalan Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi jasa Perijinan Tertentu.

Variabel Dependen :

1. Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pengukuran variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

$$PE = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

2. Kemiskinan (KM) adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan primer maupun sekunder yang bersifat mendasar. Adapun kemiskinan diukur dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$KM = \frac{(\sum \text{Penduduk Miskin Kategori 2}) + (\sum \text{Penduduk Miskin Kategori 3})}{100\%}$$

3. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pengangguran ini diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$PN = \frac{(\sum \text{Pengangguran})}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan program SPSS versi 17. Pengolahan data menggunakan polling data yakni menggabungkan data time series dan crsoss sectional. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang data yang berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standart deviasi dari variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan serta pengangguran.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah uji persyaratan sebelum melakukan uji regresi linear berganda. Tujuan dari uji asumsi klasik ini adalah untuk memenuhi beberapa unsur akurasi daya penduga parameter yang tidak bias dan untuk melihat tingkat ketelitian yang akan mencerminkan tingkat efisien hasil (Sodarmanto, 2005). Adapun uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan

melihat normal probability plot yang mana membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006).

b. Uji Multikolinearitas

Digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas dapat dilihat melalui dua cara yakni:

Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir. sebagai misal nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolinearitas 0,95 atau 95%.

Multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation faktor (VIF). jadi nilai tolerance yang rendah maka nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/\text{Tolerance}$). Nilai cut off multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2006).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika ada pola yang jelas, serta titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Sebelumnya). Cara mendeteksi ada atau tidaknya korelasi dengan menggunakan uji durbin watson (DW) yang mana digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (PP Nomor 65 Tahun 2001). Pajak dibagi menjadi dua yakni pajak daerah dan pajak propinsi. Sedangkan pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP Nomor 66 Tahun 2001). Sukirno (2004) menyatakan bahwa dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu Negara, seperti pertambahan jumlah dan produk barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi, kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan berbagai perkembangan lainnya. Senada dengan Arsyad (1999) bahwa pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Salah satu cara untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan adalah melalui pembangunan infrastruktur yang mampu memberikan manfaat luas bagi rakyat, seperti: jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara, listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, saluran irigasi dan bendungan (BPS, 2007).

Kuncoro (2004) menyatakan tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan yang sebenarnya atas barang-barang dan jasa yang diprediksikan pada suatu perekonomian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara perlu dihitung pendapatan riil yaitu Produk Domestic Regional Bruto (PDRB).

Arsyad (2004) menambahkan jika ingin tumbuh perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh. Apabila pen-

duduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas margin penduduk telah negatif, maka kemakmuran masyarakat menurun kembali dan perekonomian akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (subsistence).

Widarjono (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi juga mengakibatkan pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi. Proporsi yang besar dari penduduk yang berusia muda di dalam angkatan kerja akan mendorong perubahan teknologi dan pertumbuhan ekonomi melalui mobilitas dan adaptasi mereka. Disamping itu tekanan kepadatan penduduk akan mendorong penggunaan teknologi baru, pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, meningkatkan tabungan dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang kompleks dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Rendahnya sumber daya manusia yang ada berakibat sebagian orang tidak mampu menemukan sumber penghasilan yang cukup bagi diri sendiri maupun keluarga. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, kemiskinan berarti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan yang bersifat mendasar. Sedangkan dari sisi sosial diartikan sebagai ketidakmampuan dalam peran sosial. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2007, selanjutnya dilakukan penentuan klasifikasi rumah tangga miskin kedalam 3 kategori, yaitu mendekati/hampir miskin, miskin, dan sangat miskin yang mengacu pada Garis Kemiskinan (GK). GK sendiri tersusun atas penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dibawah GK (BPS, 2007).

Sukirno (2004) mendefinisikan lingkaran perangkap kemiskinan atau dengan singkat lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang paling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak

hambatan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Amar (2002) menambahkan bahwa dalam mengentaskan kemiskinan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil optimal karena sebagian besar kehidupan masyarakat miskin nyaris belum mengalami perubahan, mereka masih subsistem dan involutif. Terjadinya hal tersebut salah satu diantaranya disebabkan oleh kegagalan kebijakan pemerintah (public policy failure) karena kurang memperhatikan dimensi tata ruang wilayah dan cenderung menggeneralisasi masalah kemiskinan. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Karena itu, setiap perekonomian dan negara pasti mengalami masalah pengangguran, yaitu pengangguran alamiah (natural rate of employment) (Amir, 2008). Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum bekerja. (Putong, 2003; Todaro, 1995).

Badan Pusat Statistik menyebut indikator untuk melihat perkembangan pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara konseptual TPT adalah perbandingan antara banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang menganggur dibandingkan dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja. TPT ini dapat digunakan sebagai indikator kegiatan ekonomi makro di suatu wilayah/negara, karena mampu memberikan gambaran tentang seberapa besar jumlah angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam kegiatan ekonomi di suatu negara/wilayah tersebut. Sehingga TPT dapat dirumuskan sebagai berikut:

Amir (2008) menyatakan bahwa tingkat pengangguran sebesar 5,7% masih merupakan pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tidak mungkin dihilangkan. Tingkat pengangguran alamiah ini sekitar 5 -6% atau kurang. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 5% itu berarti bahwa perekon-

mian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (full employment).

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran pernah diteliti oleh beberapa penulis yakni: Studi Setiyawati dan Hamzah (2007) memberikan bukti empiris yang cukup tentang pengaruh antara PAD dan pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2005), semakin tinggi PAD maka semakin meningkat laju pertumbuhan ekonominya (Adi, 2006). Hal ini dikarenakan pajak dan retribusi daerah dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian daerahnya (Setiyawati dan Hamzah, 2007).

PAD merupakan gabungan dari komponen pendapatan yakni pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga bisa disimpulkan kalau pajak daerah dan retribusi daerah juga akan berpengaruh terhadap kemiskinan dan pengangguran. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa PAD pada kabupaten/kota di propinsi Jawa Timur meningkat dari tahun 2001-2003 masing-masing sebesar Rp 819.655juta, Rp 877.475juta, dan Rp 1.506.599juta. Sedangkan jika dikaitkan dengan data kemiskinan dan pengangguran akan didapat data yang berbanding terbalik. Data kemiskinan menurun di tahun tersebut yakni masing-masing 20,73%, 20,34%, dan 19,52% dan cenderung meningkat pada prosentase pengangguran masing-masing sebesar 4,35%, 4,90%, dan 4,81%.

Siregar (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (sufficient condition) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (growth with equity). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu diperlukan pemerintah yang cukup efektif dalam mendistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur yang padat modal.

Hal serupa juga disampaikan oleh Siregar dan Wahyuniarti (2008) dalam risetnya yang menyatakan bahwa permasalahan kemiskinan tidak dapat dipecahkan hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (trickle down effect). Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi syarat kecukupannya seperti laju inflasi serta laju populasi penduduk yang terkendali, industrialisasi pertanian/pedesaan yang tepat, serta akumulasi modal manusia yang relatif cepat, harus dipenuhi pula. Merkipun demikian pertumbuhan ekonomi membawa pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini juga pernah dibuktikan secara empiris oleh Setiyawati dan Hamzah (2007) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi ternyata dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan akibat dari peningkatan kapasitas produksi yang merupakan turunan dari peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja, begitu pula dengan investasi. Dengan meningkatnya investasi pasti permintaan tenaga kerja akan bertambah, sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan adanya peningkatan investasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran dengan asumsi investasi tidak bersifat padat modal. Hal ini telah dibuktikan secara statistik oleh Amir (2008) bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran adalah signifikan dengan koefisien pengangguran sebesar -0,464 yang artinya bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen maka pengangguran akan menurun sekitar 0,46 persen.

Namun hal tersebut berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Setiyawati dan Hamzah (2007); dan Nurhaeni dan Hamzah (2007) yang menyimpulkan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada meningkatnya pengangguran. Lalu lebih lanjut, Hamzah (2007) ternyata tidak menemukan hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran.

Data Badan Pusat Statistik juga mencatat kenaikan angka pertumbuhan ekonomi statistik kabupaten/kota di Jawa Timur didapat rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat dari pengamatan selama tiga tahun yakni tahun 2001-2003 yakni masing-masing sebesar 3,39%, 4,07%,

dan 4,28%. Bila dikaitkan dengan data kemiskinan dan pengangguran akan didapat data yang berbanding terbalik. Data kemiskinan menurun di tahun tersebut yakni masing-masing sebesar 20,73%, 20,34%, dan 19,52% dan cenderung meningkat pada prosentase pengangguran yakni masing-masing sebesar 4,35%, 4,90%, dan 4,81%. Artinya bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi membawa dampak pada pengurangan kemiskinan namun belum mampu mengurangi tingkat pengangguran.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik maka diperoleh hasil statistik deskriptif sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 1
Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

		Mini- N mum	Maxi- mum	Mean	Std. Devia- tion
Pajak Daerah	5	9.13	114.45	85.7924	43.4888
Retribusi Daerah	5	22.70	108.69	70.9330	41.3542
Pertumbuhan Ekonomi	5	10.03	11.84	10.5540	.74718
Pengangguran	5	3.29	8.61	5.6040	1.97967
Kemiskinan	5	18.78	31.83	24.9400	5.38775
Valid (listwise)	N 5				

Sumber: Data Diolah

Hasil Uji Asumsi Klasik adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Pada model – model persamaan pertama sampai keenam berdasarkan hasil pengolahan statistik uji normalitas yang ditunjukkan pada gambar normal plot yakni disimpulkan bahwa penyebaran data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. sehingga model regresi persamaan pertama te-

lah memenuhi asumsi normalitas. Maka model pertama sampai ke-enam telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengolahan statistik, diperoleh Uji Multikolinieritas pada persamaan pertama sampai ketiga adalah variabel PD memiliki korelasi sebesar 0,657 atau 65,7%. Sedangkan nilai Tolerance dan VIF (Tabel 5) variabel PD dan RD memiliki nilai Tolerance dibawah 0,1 yakni masing-masing sebesar 0,568 atau VIF dibawah 10 yakni 1,761 yang artinya bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan hasil uji multikolinieritas atas persamaan yang menggunakan model lag satu tahun, yakni persamaan empat sampai enam variabel PD memiliki korelasi sebesar 0,653 atau 65,3%. Sedangkan nilai Tolerance dan VIF variabel PD dan RD memiliki nilai Tolerance dibawah 0,1 yakni masing-masing sebesar 0,574 atau VIF dibawah 10 yakni 1,742 yang artinya bahwa juga tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil pengolahan statistik, diperoleh Uji Heterokedastisitas seperti yang terlihat gambar Scatterplot bahwa titik menyebar secara diagonal (memiliki pola tertentu). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan-persamaan tersebut terbebas dari asumsi heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Menurut tabel Durbin-Watson bahwa nilai baik du dan dl adalah tidak tertera pada tabel. Sehingga tidak dapat menghitung batas penerimaan maupun penolakan terhadap autokorelasi. Sehingga dari pendekatan tersebut bisa dikatakan bahwa variabel-variabel yang diteliti terbebas dari autokorelasi.

Berdasarkan dari hasil olah data pengujian hipotesis didapat bahwa seluruh variabel independen yang diteliti baik dengan menggunakan model persamaan tahun dasar dan persamaan lag satu tahun tidak memiliki signifikansi. Artinya secara persamaan maka hipotesis satu sampai dengan enam adalah ditolak. Artinya pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran.

Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

baik dalam model persamaan tahun dasar maupun lag satu tahun. Hal ini senada dengan Prasetyo (2010) yang menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi namun pada retribusi daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setyowati dan Hamzah (2007) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan kemungkinan pajak daerah dan retribusi daerah belum memiliki kontribusi langsung terhadap masyarakat Bojonegoro. Pada dasarnya pajak yang dibayarkan masyarakat secara langsung kepada pemerintah digunakan untuk mendanai belanja masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Alokasi belanja yang digunakan untuk masyarakat salah satunya adalah bentuk pembangunan infrastruktur.

Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan baik dalam model persamaan tahun dasar maupun lag satu tahun. Hal ini masih sesuai dengan yang pernah dilakukan Prasetyo (2010) bahwa pajak daerah tidak berpengaruh pada kemiskinan. Tetapi Setyowati dan Hamzah (2007) menyatakan lain bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dengan kata lain pajak daerah dan retribusi daerah belum mampu mengentaskan kemiskinan. Hal ini kemungkinan pemerintah kurang tepat dalam menggunakan program yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan. Amar (2002) menambahkan bahwa pemerintah belum mampu mengentaskan kemiskinan disebabkan oleh kegagalan kebijakan pemerintah kurang memperhatikan dimensi tata ruang wilayah dan cenderung mengeneralisasi masalah kemiskinan. meningkatkan pengangguran.

Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pengangguran baik dalam model persamaan tahun dasar maupun lag satu tahun. Hal ini tidak sesuai dengan Setyowati dan Hamzah (2007) dan Prasetyo (2010) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pengangguran. Dengan kata lain pajak daerah dan retribusi daerah belum mampu mengurangi pengangguran. Hal ini kemungkinan pemerintah kurang tepat dalam memiliki program yang tepat untuk mengentaskan pengangguran.

KESIMPULAN

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen pendapatan daerah. komponen-komponen pendapatan daerah tersebut tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang diukur dalam penelitian ini adalah dengan melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Berdasarkan dari hasil analisis data ternyata variabel independen yakni pajak daerah dan retribusi daerah terhadap variabel dependen yakni pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, belum mampu berpengaruh secara signifikan dari model persamaan tahun dasar dan lag satu tahun. Hal ini disebabkan kemungkinan pajak daerah dan retribusi daerah belum sepenuhnya difokuskan sebagai kegiatan peningkat pertumbuhan serta penurunan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian selanjutnya sebaiknya memasukkan variabel selain pajak daerah dan retribusi pajak, misalnya DAU, PAD, bagi hasil pajak dan lain sebagainya pada kabupaten Bojonegoro. Tahun pengamatan hendaknya diperbanyak dan objek penelitian juga sebaiknya diperluas.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, Priyo Hari. (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah: Studi pada Kabupaten dan Kota se-Jawa dan Bali. Dalam Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Amar, Syamsul (2002). Kajian Ekonomi Tentang Kemiskinan di Pedesaan Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 7, No. 2.
- Amir, Amri (2008). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia. <http://amriamir.wordpress.com/2009/12/23/15.22PM>.
- Arsyad, Licolin. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit BPFE
- BPS. (2007) Analisis Indikator Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2006-2007, Buku 1. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.
- ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS . Semarang: Penerbit BP Universitas Dipnegoro.
- hamzah, Ardi. (2007). Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pertumbuhan. Simposium Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama Pasca Sarjana UPN Veteran Surabaya: UPN Veteran.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). Ekonomi Pembangunan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Nurhaeni, Siti dan Hamzah, Ardi. (2007). Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengangguran, dan Kemiskinan. Studi pada APBN Tahun 2002-2006. Simposium Riset Ekonomi. UK Petra 2007
- PP Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- PP Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- Prasetyo, Hermawan B. (2010). Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran. Tesis. Surabaya: STESIA.
- Putong, Iskandar. (2003) Ekonomi Makro dan Mikro. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Saragi. (2005). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisa Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 4 No. 2, Desember 2007: FEUI.
- Siregar, Hermanto. (2006). Perbaikan Struktur dan Pembangunan Ekonomi : Mendorong Investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja. *Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan*. Jakarta: INDEF.
- Siregar, Hermanto dan Wahyuniarti, Dwi. (2008). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/2009/12/23/15.15PM>.
- Sukirno, Sadono. (2004). Makro Ekonomi. Cetakan ke 5, Edisi 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Todaro, Michael P. and Smith, Tephenn C. (1995). *Pengembangan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Widarjono, Agus. (1999). Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Kausalitas. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 4 No. 2
www.bps.go.id/2009/12/23/16.02PM